

SILABUS

JUDUL MATA KULIAH : PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

NOMOR KODE/SKS : 00005309 / 3 SKS

SEMESTER : 2

DOSEN :

DESKRIPSI SINGKAT : Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian korupsi, ruang lingkup, bentuk-bentuk, pembentuk perilaku koruptif. Mata kuliah ini menjelaskan pula faktor penyebab korupsi, dampak masif korupsi, nilai dan prinsip anti korupsi. Dalam pertemuan selanjutnya juga membahas mengenai upaya pemberantasan korupsi, tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Pelaksanaan perkuliahan Pendidikan Anti Korupsi selama 14 kali tatap muka.

STANDAR KOMPETENSI :

Setelah selesai menerima semua bahasan dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, maka diharapkan dapat terbentuk kepribadian anti-korupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.

NO	KOMPETENSI DASAR	MATERI PEMBELAJARAN	URAIAN MATERI PEMBELAJARAN	ES. WAKT U	MEDIA PEMBEL AJARAN	PENDEKATAN PEMBELAJARA N	PENILAIAN	DAFTAR KEPUSTAKAA N
1	Dengan tanpa membuka buku,	Pengertian Korupsi.	1. Definisi Korupsi. 2. Sejarah Korupsi.	3 X 45'	LCD, whitebo	1. Kuliah 2. Mimbar	a. Prosedur: Lisan	(1), (2), (3), (4), (5)

	<p>mahasiswa akan dapat menjelaskan secara umum Mengenai pengertian korupsi.</p>		<p>3. Kesejahteraan yang hendak dicapai oleh Negara Indonesia.</p>		<p>ard, spidol</p>	<p>3. Dialog</p>	<p>b. Bentuk soal: Tanya Jawab c. Soal: 1. Apa yang anda ketahui tentang Korupsi? 2. Mengapa sampai saat ini Indonesia masih belum bisa dikatakan sejahtera? 3. Apakah kriteria sejahtera versi Indonesia ? 4. Bagaimanakah seharusnya negara sejahtera</p>	
--	--	--	--	--	------------------------	------------------	---	--

							<p>dijalankan ?</p> <p>5. Anda sebagai mahasiswa, calon pemimpin masa depan negeri ini, bagaimana akah skenario terbaik menurut anda tentang cara membentuk negara sejahtera?</p>	
2	Mahasiswa mampu mengetahui ruang lingkup korupsi.	Bentuk-bentuk Korupsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerugian Keuangan Negara. 2. Suap-menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan 	3 X 45'	LCD, whiteboard, spidol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah 2. Mimbar 3. Dialog 	<ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur: Lisan b. Bentuk soal: Jawab c. Soal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Korupsi dapat 	(1), (2), (3), (4), (5)

			<p>Curang.</p> <p>6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.</p> <p>7. Gratifikasi.</p>				<p>terjadi dimana saja? Berikan contohnya!</p> <p>2. Di kantor: Pegawai memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi.</p> <p>3. Bagaimana Bentuk Korupsi di berbagai lingkungan tersebut?</p> <p>4. Kerugian Keuangan Negara, Suap Menyupai, Penggelapan dalam Jabatan,</p>	
--	--	--	---	--	--	--	---	--

							Pemerasaan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, Gratifikasi	
3	Dengan tanpa membuka buku, mahasiswa akan dapat menjelaskan secara umum Mengenai Pembentuk Intensi Perilaku Koruptif.	Pembentuk Intensi Perilaku Koruptif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentuk Intensi Perilaku menurut teori Fishbein & Ajzen (1975). 2. Impelmentasi teori pembentuk intensi perilaku yang terkait perilaku koruptif. 	3 X 45'	LCD, whiteboard, spidol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah 2. Mimbar 3. Dialog 	<ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur: Lisan b. Bentuk soal: Tanya Jawab c. Soal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja Pembentuk Intensi Perilaku menurut teori Fishbein & Ajzen (1975): <ul style="list-style-type: none"> – <i>Attitude toward behavior</i> 	(1), (2), (3), (4), (5)

							<p>(ATB: yang dipengaruhi oleh <i>behavioral belief</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Subjective norms</i> (SN): yang dipengaruhi oleh <i>subjective norms</i>.- <i>Control belief</i> (CB): acuan kesulitan dan kemudahan untuk memunculkan suatu perilaku yang dipengaruhi oleh <i>perceived behavior control</i>.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							<p>2. Apa yang dimaksud dengan Attitude toward behavior (ATB) jika dikaitkan dengan perilaku Koruptif dan AnStandar Kompetensi Korupsi? yaitu evaluasi positif ataupun negatif terhadap suatu perilaku tertentu - tercermin dalam kata-kata seperti, benar-salah, setuju-</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							tidak setuju, baik-buruk, dll. Evaluasi negatif terhadap perilaku korupsi dan evaluasi positif terhadap Standar Kompetensi akan meningkatkan intensi (potensi) untuk berperilaku anti-korupsi.	
4	Dengan tanpa membuka buku, mahasiswa akan dapat menjelaskan secara umum	Faktor penyebab korupsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor Hukum. 2. Faktor Ekonomi. 3. Faktor Organisasi. 	3 X 45'	LCD, whiteboard, spidol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah 2. Mimbar 3. Dialog 	<ol style="list-style-type: none"> a. Teknik: Lisan b. Bentuk tes : Tanya 	(1), (2), (3), (4), (5)

	Mengenai Faktor penyebab korupsi.		4. Faktor PoliStandar Kompetensi.				<p>Jawab</p> <p>c. Soal: 1. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain apa saja?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspek perilaku individu, - Aspek organisasi , - Aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. <p>2. Bagaimana kaitan antara perilaku koruptif yang dimunculkan oleh</p>	
--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

							faktor Ekonomi, PoliStandar Kompetensi, Hukum dan Organisasi ? Ilustrasi pada kasus <i>Money politic</i> jelang pemilu.	
5	Dengan tanpa membuka buku, mahasiswa akan dapat menjelaskan secara umum Mengenai Dampak masif korupsi.	Dampak masif korupsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak Ekonomi. 2. Dampak Sosial & Kemiskinan. 3. Dampak birokrasi pemerintahan. 4. Dampak PoliStandar Kompetensi & Demokrasi. 5. Dampak terhadap penegakan hukum. 	3 X 45'	LCD, whiteboard, spidol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah 2. Mimbar 3. Dialog 	<ol style="list-style-type: none"> a. Teknik: Lisan b. Bentuk tes : Tanya Jawab c. Soal: 1. Korupsi mempunyai dampak pada Ekonomi suatu negara, bagaiman 	(1), (2), (3), (4), (5)

			<p>6. Dampak terhadap Hankam.</p> <p>7. Dampak terhadap kerusakan lingkungan.</p>			<p>a proses itu dapat kita lihat?</p> <p>– Korupsi memperlemah investasi, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>2. Bagaimana dampak korupsi terhadap kehidupan sosial di masyarakat?</p> <p>Korupsi mengakibatkan mahalnya barang dan jasa pelayanan publik, sehingga upaya pengentasan</p>	
--	--	--	---	--	--	---	--

							<p>kemiskinan berjalan lambat. Meningkatnya angka kemiskinan mengakibatkan kerentanan kriminalitas. Kondisi yang tidak sejahtera memperlemah solidaritas sosial.</p>	
6	<p>Dengan tanpa membuka buku, mahasiswa akan dapat menjelaskan secara umum Mengenai Nilai dan Prinsip Anti korupsi.</p>	<p>Nilai dan Prinsip Anti korupsi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Anti Korupsi. 2. Prinsip Anti Korupsi 	3 X 45'	<p>LCD, whiteboard, spidol</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah 2. Mimbar 3. Dialog 	<ol style="list-style-type: none"> a. Teknik: Tanya Jawab b. Bentuk tes : Lisan c. Soal: 1. Sebutkan 9 Nilai Anti Korupsi yang harus 	<p>(1), (2), (3), (4), (5)</p>

							<p>dihidupi?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kejujuran, Kemandirian, Kepedulian, Kedisiplinan, Tanggung jawab, Kerja keras, Kesederhanaan, Keberanian, Keadilan. 2. Sebutkan 5 Prinsip Anti Korupsi? Akuntabilitas, Transparansi, Kewajaran, Kebijakan, Kontrol Kebijakan. 	
7	Dengan tanpa	Upaya	1. Jalur Penal.	3 X 45'	LCD,	1. Kuliah	a. Teknik:	(1), (2), (3), (4),

	membuka buku, mahasiswa akan dapat menjelaskan secara umum Mengenai Upaya pemberantasan korupsi.	pemberantasan korupsi.	2. Jalur Non-Penal.		whiteboard, spidol	2. Mimbar 3. Dialog	Tanya Jawab b. Bentuk tes : Lisan c. Soal: 1. Korupsi merupakan kejahatan (<i>crime</i>), maka apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah? – Menindak para koruptor dengan jerat-jerat hukum serta memberantas korupsi dengan memperk	(5)
--	--	------------------------	---------------------	--	--------------------	------------------------	---	-----

							<p>uat perangkat hukum seperti undang- undang dan aparatus hukum.</p> <p>2. Bagaimana upaya pencegahan Korupsi melalui Hukum Pidana (jalur PENAL)?</p> <p>3. Bagaimana upaya pencegahan Korupsi tanpa melalui Hukum Pidana (jalur Non-</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							PENAL)?	
8	Dengan tanpa membuka buku, mahasiswa akan dapat menjelaskan secara umum Mengenai Gerakan kerjasama Instrument Internasional mencegah Korupsi.	Gerakan kerjasama Instrumen Internasional mencegah Korupsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan Korupsi melalui pendekatan Bottom-Up. 2. Pencegahan korupsi melalui pendekatan Top-Down. 3. Konvensi internasional dan lembaga Anti korupsi di berbagai negara. 	3 X 45'	LCD, whiteboard, spidol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah 2. Mimbar 3. Dialog 	<ol style="list-style-type: none"> a. Teknik: Tanya Jawab b. Bentuk tes : Lisan c. Soal: 1. Jelaskan upaya pencegahan korupsi melalui pendekatan Bottom-Up! 2. Jelaskan upaya pencegahan korupsi melalui pendekatan Top-Down! 3. Jelaskan upaya pencegahan korupsi 	(1), (2), (3), (4), (5)

							yang dilakukan oleh lembaga internasional dan di berbagai negara lain!	
9	Dengan tanpa membuka buku, mahasiswa akan dapat menjelaskan secara umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.	Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Latar Belakang Lahirnya Delik Korupsi dalam Perundang-undangan Korupsi. 3. Delik Korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang 	3 X 45'	LCD, whiteboard, spidol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah 2. Mimbar 3. Dialog 	<ol style="list-style-type: none"> a. Teknik: Tanya Jawab b. Bentuk tes : Lisan c. Soal: 1. Ceritakan secara singkat tentang sejarah Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 2. Jelaskan apa Latar 	(1), (2), (3), (4), (5)

			Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.				Belakang Lahirnya Delik Korupsi dalam Perundang-undangan Korupsi di Indonesia.	
10	Dengan tanpa membuka buku, mahasiswa akan dapat menjelaskan secara umum Mengenai Peran mahasiswa dalam gerakan Anti Korupsi.	Peran mahasiswa dalam gerakan Anti Korupsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Gerakan Anti Korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa. 2. Peran Mahasiswa dalam tingkat Lokal dalam gerakan Anti Korupsi. 3. Peran mahasiswa di tingkat Nasional dalam gerakan Anti Korupsi. 	3 X 45'	LCD, whiteboard, spidol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah 2. Mimbar 3. Dialog 	<ol style="list-style-type: none"> a. Teknik: Tanya Jawab b. Bentuk tes : Lisan c. Soal: 1. Ceritakan secara singkat tentang sejarah Gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa 	(1), (2), (3), (4), (5)

							<p>a di Indonesia.</p> <p>2. Jelaskan peran mahasiswa di tingkat lokal dan nasional terkait dengan gerakan anti korupsi.</p>	
11, 12, 13 dan 14	<p>Mahasiswa akan dapat menjelaskan dan memberikan berbagai argumen analisis Mengenai Kasus korupsi yang terjadi di lingkungan masyarakat kawasan hutan hujan tropis dan bentuk gerakan Anti Korupsi di tempat tersebut.</p>	<p>Peran mahasiswa dalam gerakan Anti Korupsi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus korupsi di kawasan hutan hujan tropis Kalimantan Timur. 2. Faktor yang menyebabkan korupsi tersebut. 3. Upaya / bentuk gerakan anti korupsi di lingkungan tersebut. 	3 X 45'	<p>LCD, whiteboard, spidol</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah 2. Mimbar 3. Dialog 	<ol style="list-style-type: none"> a. Teknik: Tanya Jawab b. Bentuk tes : Lisan c. Soal: 1. Ceritakan secara singkat tentang kasus korupsi serta Gerakan anti korupsi 	<p>(1), (2), (3), (4), (5)</p>

							yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan hutan hujan tropis Kalimantan Timur.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

REFERENSI BUKU:

1. Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
2. Baharudin Lopa. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum*. Jakarta: Penerbit Kompas.
3. Dharmawan (ed). 2004. *Surga Para Koruptor*. Jakarta: Penerbit Kompas.
4. Suyatno. 2005. *Korupsi Kolusi Nepotisme*. Jakarta: CV. Muliasari.
5. Wahyudi Kumorotomo. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.